PENUTUPAN ASURANSI DALAM KEGIATAN DEPOSITO

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma *)

ABSTRACT

Bank as a financial institution has many activities to make profits. For example, it receives money from its customers as deposits. It is possible that in running its business, because of some reasons, the bank cannot deliver the money when its customers want to withdraw their money. If this occurs, no customer trusts that bank anymore. Then the bank will not make money anymore and go bankrupt. To avoid this thing, the bank need to conclude an insurance agreement with an insurance company to shift the risk. This article discusses some problems which may arise in this matter.

I. PENDAHULUAN

Dalam era pembangunan ini, perbankan memegang peran penting sebagai salah satu sumber permodalan dan perantara keuangan. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank memegang peran penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat, dengan jalan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan-simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).

Istilah bank itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar.¹⁾ Menurut G. M. Verryin Stuart: "Bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral."²⁾ Menurut pakar lainnya disebutkan bahwa bank adalah suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga, sedangkan Thomas Suyatno memberi batasan pengertian mengenai bank ini seperti berikut: "Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan."³⁾

Menurut A. Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, melakukan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda

*) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

1) Pratama Raharja, *Uang dan Perbankan*, Jakarta: Bineka Cipta, 1990, hlm. 64.

2) *Ibid.*, hlm. 65

3) Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 1.

berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain".⁴⁾ Jika dilihat pada ketentuan Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tertera bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bank adalah merupakan suatu badan yang kegiatannya menerima kredit, memberikan kredit (baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang) serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Dengan kata lain, bank adalah merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit, perantara di dalam lalu lintas pembayaran, dan juga pemberi jasa-jasa bank lainnya.

Meskipun masih banyak terdapat pengertian mengenai bank, tetapi pada dasarnya tidaklah berbeda antara satu dengan lainnya. Kalaupun ada perbedaan, hal tersebut hanya nampak pada tugas dan usaha dari bank.

Menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, berdasar atas fungsinya, bank dapat di bagi menjadi:

1. Bank Sentral, ialah bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu sebagai bank sentral atau pemimpin dari bank-bank.
2. Bank Umum, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
3. Bank Tabungan, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan, dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
4. Bank Pembangunan, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
5. Bank Desa, ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura, dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

4) *Ibid.*, hlm. 1

PENUTUPAN ASURANSI DALAM KEGIATAN DEPOSITO

Menurut dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menurut jenisnya bank dibagi menjadi:

1. Bank Umum, yaitu bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, antara lain inkaso, transfer, dan pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito, tabungan dan bentuk lain yang sejenis.
3. Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia, dan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Kegiatan atau aktivitas Bank dalam segala macam dan bentuknya tersebut, sering menemui risiko yang tidak diharapkan kedatangannya, yang dapat membawa akibat kerugian baik bersifat materiil maupun immateriil. Untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi tersebut, menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak,⁵⁾ diusahakan dengan cara: (1) menghindari (*avoidance*), (2) mencegah (*prevention*), (3) memeralihkan (*transfer*), dan (4) menerima (*assumption or retention*).

Usaha manusia untuk mengurangi kerugian yang timbul sebagai akibat adanya risiko tadi, umumnya adalah dengan jalan memeralihkan risiko (*transfer of risk*) kepada suatu lembaga peralihan risiko yang disebut dengan asuransi atau pertanggungan. Demikian pula dalam aktivitas bank yang penuh dengan risiko ini, dapat dihindari dan dieliminasi dengan mengadakan peralihan risiko kepada lembaga asuransi.

Dalam tulisan ini, akan disoroti risiko yang mungkin bisa terjadi dalam aktivitas bank dan cara memeralihkan risiko tersebut, khususnya dalam kegiatan simpanan deposito.

5) Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1975, hlm. 2.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Hidup manusia selalu penuh dengan segala macam kemungkinan baik yang positif maupun negatif, hal ini sudah merupakan suatu keadaan awal dari kehidupan itu sendiri. Ungkapan yang tepat untuk itu pernah diungkapkan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak,⁶⁾ seperti berikut:

"Kemungkinan bahwa manusia akan menghadapi suatu kerugian atau suatu kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap manusia sejak manusia tidak lagi bertempat tinggal di Taman Firdaus (di mana segala kebutuhan hidup sudah tersedia) dan harus dengan tenaga dan pikirannya untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya, untuk memiliki harta kekayaan demi kelangsungan hidup."

Jadi sesuai dengan sifatnya yang fana dan tidak kekal, kehidupan ini diliputi oleh ketidak pastian atau kemungkinan. Kemungkinan manusia menghadapi kehilangan atau kerugian itu merupakan suatu risiko. Keadaan tidak pasti inilah yang kemudian mendorong manusia untuk berdaya upaya dalam mengatasinya menjadi suatu keadaan yang pasti.

Asuransi yang merupakan buah peradaban manusia, diciptakan guna mengatasi kesulitan manusia tersebut yang dimulai sebagai suatu gagasan untuk memperoleh perlindungan (*proteksi*) terhadap rasa tidak aman karena ketidak pastian yang selalu mengikutinya. Asuransi dalam terminologi hukum, mengandung arti yang pasti yaitu sebagai suatu jenis perjanjian. Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan yang spesifik dan pasti yang berkisar pada manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian.

Jadi perjanjian asuransi itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa.⁷⁾ Keadaan tidak pasti tersebut lazim disebut sebagai suatu risiko. Menurut James L. Athearn dalam bukunya *Risk and Insurance* yang dikutip oleh Sri Rejeki Hartono,⁸⁾ mengatakan bahwa risiko merupakan aspek utama dari kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Dilain pihak, menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak,⁹⁾ setiap manusia yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan miliknya karena berbagai sebab, dia disebut menghadapi suatu risiko.

6) Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980, hlm. 3

7) Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 83.

8) *Ibid.*, hlm. 60.

9) Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 4

Setiap risiko pada hakikatnya adalah suatu yang sama sekali tidak dikehendaki oleh siapapun juga. Oleh karena itu siapapun juga selalu berusaha dan berdaya upaya bagaimana caranya, sesuatu yang tidak diharapkan itu andaikata terjadi tidak terlalu membebani dirinya sendiri. Cara mengurangi beban dari risiko yang terjadi dapat dengan mengalihkan risiko (*transfer of risk*) tersebut, dan peralihan risiko ini dapat dilakukan dengan jalan menutup asuransi.

Sejalan dengan hal tersebut, Mehr dan Cammack¹⁰⁾ memberikan batasan pengertian asuransi seperti berikut: "*Insurance may be defined as advice for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collectively predictable*" (Asuransi dapat didefinisikan sebagai alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit guna mengumpulkan taksiran kerugian yang mungkin terjadi).

Dari Simposium Hukum Asuransi di Universitas Andalas Padang yang diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 15 November 1976, dicakup suatu pengertian tentang bagaimana hubungan antara risiko dan asuransi, yaitu bahwa dari sudut ekonomi, asuransi merupakan peralihan sebagian/seluruh risiko dari tertanggung kepada penanggung. Jadi asuransi sangat bermanfaat bagi individu, kelompok orang, maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Emmy Pangaribuan Simanjuntak¹¹⁾ yang mengatakan bahwa peralihan risiko dengan pertanggungan/asuransi dalam bidang usaha-usaha besar dianggap suatu cara yang paling menguntungkan.

Dasar hukum asuransi diatur dalam ketentuan Pasal 1774 KUHPerdara, yang mengelompokkannya ke dalam perjanjian untung-untungan (*kans overeenkomst*). Banyak para ahli hukum yang kurang sependapat dengan dimasukkannya perjanjian asuransi ini ke dalam perjanjian untung-untungan, termasuk dalam hal ini adalah Emmy Pangaribuan Simanjuntak.¹²⁾

Selain diatur dalam ketentuan Pasal 1774 KUHPerdara, pokok-pokok pengaturan asuransi lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada Buku I Bab 9 dan 10, serta Buku II Bab 9 dan 10. Dengan keluarnya Undang-Undang

10) Robert I. Mehr & Emerson Cammack, *Principles of Insurance*, Homewood: Illinois, Richard D. Irwin, Inc., 1980.

11) Emmy Pangaribuan Simanjuntak, "Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya," *Op. Cit.*, hlm. 4

12) Emmy Pangaribuan Simanjuntak, "Hukum Pertanggungan," *Op. Cit.*, hlm. 7.

No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dinyatakan berlaku pada tanggal 11 Pebruari 1992, ketentuan asuransi yang terdapat dalam KUHDagang masih tetap berlaku, sebab Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tidak mengatur substansi dari perjanjian asuransi tetapi hanya mengatur usaha di bidang perasuransian.

Apabila disimak, ketentuan Pasal 247 KUHDagang menyebutkan adanya beberapa macam asuransi, yaitu : asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan asuransi pengangkutan (melalui laut). Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada dua jenis asuransi, yaitu asuransi ganti rugi/asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang atau asuransi orang (*sommen verzekering* atau *personen verzekering*). Dalam praktik perasuransian, macam asuransi tersebut lebih banyak lagi dibanding dengan macam asuransi yang tersurat dalam ketentuan Pasal 247 KUHDagang. Hal ini terjadi dan tidak dilarang, sebab ketentuan Pasal 247 KUHDagang tersebut tidak bersifat *limitatif* atau membatasi timbulnya berbagai macam asuransi baru sesuai kebutuhan masyarakat, karena adanya kata "antara lain" yang terdapat di dalam pasal tersebut. Dengan demikian sifat dari ketentuan Pasal 247 KUHDagang, hanya menyebutkan beberapa contoh saja atau bersifat *numeratif*.

Perkembangan macam asuransi yang terjadi di dalam praktik ini, didukung pula oleh asas yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara (asas kebebasan berkontrak) dan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara (syarat sahnya suatu perjanjian). Selain itu, terdapat pula di dalam ketentuan Pasal 247 KUHDagang, Pasal 250 KUHDagang (tentang pokok pertanggungangan/kepentingan), Pasal 268 KUHDagang (tentang syarat kepentingan yang bisa diasuransikan), serta Pasal 264 dan 265 KUHDagang.

Apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka (5)-nya, secara jelas di dalamnya dicantumkan bahwa perusahaan asuransi kerugian adalah memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

III. PEMBAHASAN

Dengan pesatnya perkembangan iptek, semakin banyak pula kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Adanya deregulasi di bidang moneter dan perbankan yang dimulai sejak Juni 1983, kemudian deregulasi 27 Oktober 1988, yang kemudian disusul lagi dengan deregulasi 20 Desember 1988 dan dilanjutkan melalui deregulasi Maret 1991, telah dapat meningkatkan kemampuan dunia perbankan dan sektor

keuangan pada umumnya dalam menunjang perkembangan dunia usaha, khususnya yang berorientasi kepada ekspor nonmigas.

Bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali, sudah tentu akan berusaha dengan segala upaya untuk menghimpun dana tersebut sebanyak-banyaknya. Dana yang diperoleh bank tersebut bersumber dari bank itu sendiri, masyarakat luas, dan lembaga keuangan baik bank maupun nonbank.

Pada umumnya dana yang berasal dari masyarakat luas dapat berbentuk simpanan giro, deposito dan tabungan. Dalam praktik dikenal adanya beberapa macam deposito, yaitu:

1. Deposito berjangka, yaitu simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan deposan. Bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan.¹³⁾
2. Sertifikat deposito, yaitu bentuk simpanan yang pada dasarnya sama dengan surat tanda bukti penyimpanan uang di bank dalam jangka waktu tertentu, dengan bunga yang dibayar di muka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito tersebut dibeli tunai.¹⁴⁾
3. Deposito *on call*, yaitu simpanan yang tetap berada di bank selama deposan tidak membutuhkannya. Bila deposan akan menarik simpanan deposito tersebut, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada bank.¹⁵⁾
4. Deposito *automatic roll-over*, yaitu deposito yang sudah jatuh tempo akan tetapi pinjaman pokok belum diuangkan, maka uang deposan secara otomatis diperhitungkan bunganya begitu jangka waktu deposito habis, walaupun tidak diambil oleh deposan.¹⁶⁾

13) O. P. Simorangkir, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Jakarta: Aksara Persada, 1989, hlm. 100.

14) *Ibid.*, hlm. 100.

15) M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 84.

16) *Ibid.*, hlm. 85.

Sehubungan dengan simpanan pihak ketiga pada bank dalam bentuk deposito berjangka tersebut, karena pembukaan rekening depositonya melalui suatu perjanjian antara bank dengan deposan, maka perjanjian deposito tersebut jika dikaji dapat dimasukkan ke dalam perjanjian pinjam uang dengan bunga. Dengan demikian, mendudukan bank sebagai pihak peminjam (debitur) yang harus membayar bunga kepada pihak deposan (kreditur).

Dalam memobilisasi dana masyarakat tersebut, bank tidak lepas dari masalah-masalah dan risiko-risiko yang mungkin dihadapinya. Untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan ini diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat menjamin risiko-risiko yang mungkin timbul dan menimpa nasabah yang bila terjadi dapat menimbulkan kerugian.

Deposan sewaktu-waktu dapat mengalami suatu risiko, yaitu kesulitan untuk mencairkan uangnya yang disimpan pada bank pada waktu tanggal jatuh tempo, sehingga deposan kemungkinan kehilangan uangnya atau berkurang nilai uangnya, baik simpanan pokok maupun bunganya.¹⁷⁾

Timbulnya risiko tersebut dalam hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu:

1. Kepailitan dari pihak bank.
2. Direktur bank bersangkutan melarikan diri dengan membawa uang nasabah.
3. Adanya kredit macet.
4. Adanya inflasi.
5. Adanya risiko politik, misalnya negara dalam keadaan perang.¹⁸⁾

Sehubungan dengan adanya risiko yang tinggi di dalam pemberian deposito ini, maka perlu adanya suatu peralihan risiko, kepada lembaga peralihan risiko atau perusahaan asuransi. Perjanjian peralihan risiko ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seperti berikut :

1. Penutupan dilakukan oleh pihak bank.

Bank dalam hal ini menutup perjanjian asuransi deposito berdasarkan tanggung jawabnya atas hilang atau berkurangnya deposito. Tanggungjawab ini lahir berdasarkan perjanjian yang dibuat antara pihak bank dengan deposan, yaitu perjanjian deposito.

17) *Ibid.*, hlm. 100.

18) *Ibid.*, hlm. 101.

PENUTUPAN ASURANSI DALAM KEGIATAN DEPOSITO

Dalam perjanjian deposito, bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut yaitu mengembalikan uang pokok dan bunga deposito, tepat pada waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian. Karena itu apabila pada waktu tanggal jatuh tempo bank tidak dapat mengembalikan uang deposit, maka dia bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya uang deposit tersebut.

Untuk mengatasi risiko yang mungkin dialami deposit tersebut sebagai tanggung jawab bank, bank kemudian mengalihkannya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung melalui perjanjian asuransi deposito. Adapun kepentingan atau pokok pertanggungan yang ada di sini adalah kepentingan dari pihak bank, yaitu pertanggungan jawabnya (tanggung jawab hukum) kepada pihak ketiga atas uang mereka yang ada dan dikelola oleh pihak bank.

Deposit selaku pihak yang dirugikan, berhak atas ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan asuransi deposito. Hak deposit ini ditunjuk dalam perjanjian asuransi deposito yang dilakukan antara pihak bank dengan perusahaan asuransi, dengan dasar pertimbangan bahwa yang berkepentingan atas hilangnya uang yang menjadi obyek asuransi adalah deposit. Dasar dari asuransi tanggung jawab atau asuransi untuk kepentingan pihak ketiga ini diatur dalam ketentuan Pasal 247, 250, 264, 265, dan 268 KUHDagang.

Dalam hal pihak bank yang melakukan penutupan perjanjian asuransi, maka di sini terjadi asuransi tanggung jawab (*liability insurance*) berdasarkan perjanjian, di mana pihak bank menunjuk deposit sebagai pihak penerima ganti rugi seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 1317 KUHPerdara, yang mengatur bahwa para pihak dapat mengadakan perjanjian dengan janji bahwa salah satu pihak dibebankan kewajiban untuk melakukan prestasi kepada pihak ketiga yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut. Hanya permasalahannya di sini adalah apakah pihak bank bersedia untuk menutup dan membayar premi asuransi deposito.³³

2. Penutupan dilakukan oleh deposit.

Apabila perjanjian asuransi ditutup oleh pihak deposit dengan perusahaan asuransi, maka di sini deposit menjadi tertanggung dan berkewajiban membayar premi, dan perusahaan asuransi menjadi pihak penanggungnya. Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan asuransi dan deposit adalah merupakan perjanjian asuransi biasa, sehingga kepentingan yang ada di sini adalah hilangnya atau berkurangnya uang deposit pada bank, atau dengan kata lain yaitu adanya risiko pada deposit yang kemungkinan dapat terjadi dan mengakibatkan kerugian material maupun immaterial pada pihak deposit (tertanggung).

Penutupan perjanjian asuransi oleh deposan sendiri dalam kegiatan deposito ini, kemungkinan terjadinya sangat kecil, sebab deposan akan berkeberatan untuk membayar premi apalagi setelah deposito dikenakan pajak penghasilan. Selain itu, deposan bisa akan berpaling memilih bank lainnya, yang dianggap lebih bonafide.

IV. KESIMPULAN

Setelah diuraikan panjang lebar dalam uraian terdahulu, maka pada bagian ini akan diutarakan suatu kesimpulan seperti berikut.

Pertama, yang dimaksudkan sebagai asuransi tanggung jawab terhadap pihak ketiga atau asuransi tanggung jawab hukum terjadi karena penutupan perjanjian yang disebut perjanjian asuransi deposito, antara pihak bank sebagai tertanggung dengan pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung.

Kedua, selain asuransi tanggung jawab hukum (*liability insurance*), dalam suatu kegiatan deposito, bisa pula terjadi penutupan perjanjian asuransi biasa yang dilakukan antara pihak deposan sendiri sebagai tertanggung dengan pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung.

Ketiga, asuransi deposito ini berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam KUHPerdara (Pasal 1338 jo. Pasal 1320), KUHDagang (Pasal : 247, 250, 264, 265, dan 268), Undang-Undang No.13 Tahun 1968 (Pasal 30 dan Penjelasannya), Undang-Undang No.2 Tahun 1992 [Pasal 1 Angka (1) dan Angka (5)], serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973.

Keempat, dalam praktik perasuransian, asuransi deposito ini belum begitu memasyarakat, karena adanya beberapa kendala.